



KENAIKAN BBM TAK BERDAMPAK PADA OPERASIONAL

Pengawasan Kendaraan Dinas Diperketat

YOGYA (MERAPI) -Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) subsidi tidak berdampak signifikan terhadap APBD Kota Yogyakarta. Meski demikian pengawasan kendaraan dinas dalam menggunakan BBM non subsidi akan diperketat. Jika terbukti melanggar menggunakan BBM subsidi, kendaraan dinas terancam dikandangkan.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menuturkan, kendaraan dinas pemkot sesuai aturan pemerintah pusat sudah menggunakan BBM non subsidi. Oleh sebab itu kenaikan harga BBM ini tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD. Pihaknya berharap masyarakat juga terlibat mengawasi kendaraan dinas yang wa-

jab BBM non subsidi.

"Itu yang diawasi. Plat merah di kota yang minta BBM subsidi di SPBU jangan dilayani," tegas Haryadi, Rabu (19/11).

Pemkot Yogyakarta akan memperbanyak stiker BBM non subsidi untuk ditempel di kendaraan dinas pemkot. Stiker itu untuk menandakan kendaraan plat merah agar dilayani BBM non subsidi di SPBU.

Ditegaskan jika ada kendaraan dinas yang terbukti menggunakan BBM subsidi, kendaraan dinas terancam dikandangkan. "Kalau terbukti menggunakan BBM subsidi itu berarti tidak mengindahkan aturan. Tidak usah memakai kendaraan dinas saja," ujarnya.

Meskipun kenaikan harga

BBM tidak berdampak signifikan pada APBD, upaya penghematan anggaran dilakukan Pemkot Yogyakarta. Diakuinya kenaikan harga BBM akan berdampak pada lonjakan kebutuhan operasional. Namun selama sisa waktu sampai akhir tahun tidak ada kegiatan fisik berat karena APBD Perubahan 2014 tidak terbahas sehingga tidak sam-

pai memotong biaya operasional. Meski demikian pihaknya mengkaji surat edaran tentang penghematan anggaran.

Dia menyebut rapat kedinasan dioptimalkan dilakukan di kompleks Balaikota. Namun jika membutuhkan ruang pertemuan besar akan menggunakan gedung pertemuan.

Sementara itu Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan

Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono menambahkan salah satu penghematan anggaran adalah pemotongan uang BBM untuk kendaraan dinas tiap hari Jumat. Pada kendaraan dinas jabatan mendapatkan jatah 5 liter pertamax, sehingga dengan 32 kendaraan dinas jabatan akan menghemat sekitar Rp 1,6 juta. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005